

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

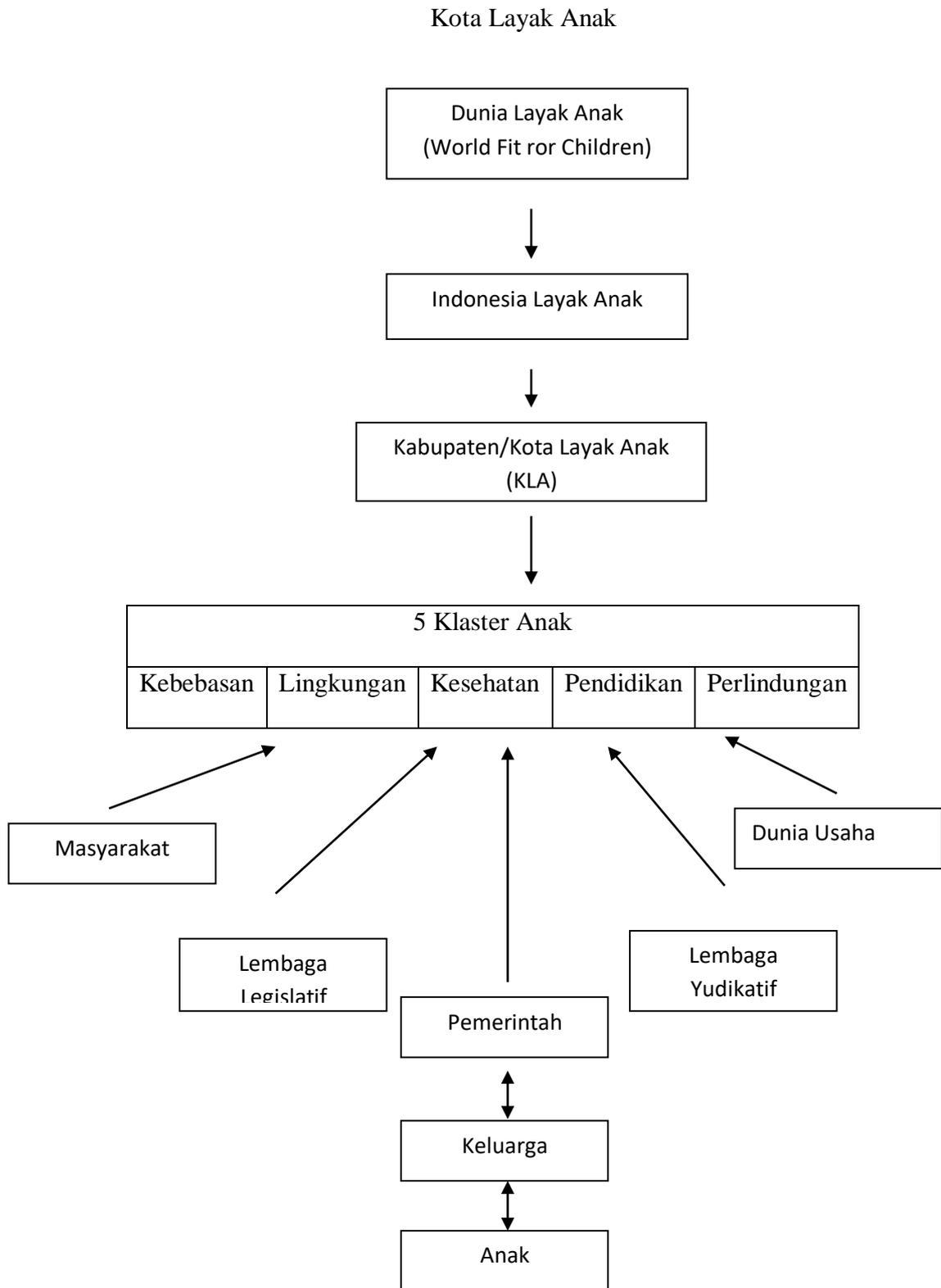
Studi ini akan membahas mengenai strategi pemerintah Daerah dalam pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak di Kota Yogyakarta, karena Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menyandang gelar sebagai Kota Layak Anak (KLA). Kota Yogyakarta sendiri sudah menjadi contoh untuk kabupaten lain yang ada di DI Yogyakarta untuk mencapai predikat layak anak dengan program dan fasilitas yang sudah dicapai oleh Kota Yogyakarta. Dalam upaya mencapai predikat Kota Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak (level tertinggi) pada tahun 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan konsep kampung ramah anak (KRA) di setiap RW di seluruh kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Tujuan pembentukan kampung ramah anak ini adalah untuk menstimulasi pengembangan Kota Layak Anak yang dimulai dari bawah/akar rumput(bottom up). Melalui pembentukan kampungkampung ramah anak tersebut, diharapkan akan mempermudah terbentuknya kelurahan layak anak, kecamatan layak anak hingga menjadi kota yang layak anak. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan pengembangan kampung layak anak, kelurahan layak anak, serta kecamatan layak anak merupakan rangkaian dari optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta.

Anak-anak sendiri merupakan aset penerus bangsa yang memiliki hak-hak yang dilindungi seperti hak bertahan hidup, tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang layak. Untuk itu perkembangan anak membutuhkan dukungan fasilitas yang layak dari pemerintahan daerah itu sendiri. Indonesia telah menetapkan Undang-

undang nomor 23 tahun 2002 mengenai “perlindungan anak sebagai pelaksanaan konvensi PBB tentang Hak anak”. Selain itu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2004 menjelaskan mengenai “pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”. Maka dari itu pemerintah desa harus memiliki ruang bebas untuk anak-anak bermain dan meluangkan waktu di masa kecilnya. Sehingga banyak kabupaten/kota di Indonesia yang terdorong untuk menjadi kabupaten/kota layak anak begitu pula kabupaten-kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

## Gambar Bagan 1

### Struktur awal Kota Layak Anak pada tingkat Nasional



Dokumen : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Tahun 2013

Di Indonesia sendiri belum banyak Kota yang mendapat predikat sebagai Kota yang Ramah Terhadap anak ataupun Kota Layak Anak. Dari 514 Kabupaten/Kota yang ada menurut website resmi Kementrian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019 Kurang lebih terdapat 264 Kabupaten/Kota yang menerapkan layak anak. Untuk terus meningkatkan dan merangkul Kabupaten/Kota lainnya diIndonesia sebagai Kota Layak Anak diperlukan kerjasama dari semua pihak termasuk dari masyarakatnya. Untuk memiliki system perlindungan anak yang dapat dianggap efektif Pemerintahan mensyaratkan beberapa Komponen yang saling terikat. Komponen-komponen tersebut meliputi berbagai sistem seperti kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, dan mekanisme yang dapat mendorong perilaku baik dan sesuai untuk masyarakat (widyawati, 2018).

Mendapatkan predikat Kota Layak Anak tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi suatu Kabupaten maupun Kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak daerah di indonesia yang masih memiliki permasalahan mengenai lingkungan yang layak terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada pedoman Profil Anak Indonesia tahun 2015 menjelaskan bahwa, kategori yang akan diberikan kepada Daerah yang mengikuti program KLA sebagai apresiasi yaitu : dari paling bawah yaitu Pratama, Madya, Nidya, Utama, dan paling teratas yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia perlu diapresiasi, sebab memberikan memberikan harapan terciptanya generasi muda yang berkualitas, sehat, cerdas, kuat dan ramah. Fokus kebijakan ini menyinergikan pembangunan

sumber daya manusia khususnya anak-anak dan remaja selaku generasi muda dengan lingkungan kota yang humanis, dan berperan strategis dalam perencanaan pembangunan manusia Indonesia ke depan. Kota Yogyakarta merupakan kota pertama yang menerapkan kebijakan Kota Layak Anak di Provinsi Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan Kota Layak Anak melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta.

Dalam sejarahnya, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memulai inisiasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak sejak 2009 dari tingkatan pratama (terendah). Indikator kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta terbagi ke dalam enam bidang (klaster) yaitu, komitmen wilayah, hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, perlindungan khusus, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Namun setelah 6 tahun berjalan, implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta yang berada di bawah koordinasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum berhasilnya Kota Yogyakarta meningkatkan predikat Kota Layak Anak ke level yang lebih tinggi. Di tingkat nasional, pada tahun 2012 Kota Yogyakarta hanya meraih predikat Kota Layak Anak tingkat madya.

Dalam upaya dalam mencapai predikat Kota Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak (level tertinggi) pada tahun 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan konsep kampung ramah anak (KRA) di setiap RW di seluruh kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Tujuan pembentukan kampung-kampung ramah anak ini adalah untuk menstimulasi pengembangan Kota Layak Anak yang dimulai dari bawah/akar rumput(bottom up). Melalui pembentukan kampung-

kampung ramah anak tersebut, diharapkan akan mempermudah terbentuknya kelurahan layak anak, kecamatan layak anak hingga menjadi kota yang layak anak. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan pengembangan kampung layak anak, kelurahan layak anak, serta kecamatan layak anak merupakan rangkaian dari optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan.

**Tabel 1.**

**Kelurahan Kota Yogyakarta**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Danurejan	Bausasran, Tegalpanggung, Suryatmajan
2	Gedongtengen	Pringgokusuman dan Sosromenduran
3	Gondokusuman	Terban, Demangan, Klitren, Kotabaru, Baciro
4	Gondomanan	Ngupasan dan Prawirodirjan
5	Jetis	Bumijo, Cokrodiningratan, Gowongan
6	Kotagede	Prenggan, Purbayan, Rejowinangun
7	Kraton	Panembahan, Kadipaten, dan Patehan
8	Mantrijeron	Gedongkiwo, Suryodiningratan, dan Mantrijeron
9	Mergangsan	Brontokusuman, Keparakan, dan Wirogunan
10	Ngampilan	Ngampilan dan Notoprajan
11	Pakualaman	Gunungketur dan Purwokinanti
12	Tegalrejo	Bener, Karangwaru, Kricak, dan Tegalrejo
13	Umbulharjo	Pandeyan, Sorosutan, Giwangan, Warungboto, Mujamuju, Semaki, dan Tahunan
14	Wirobrajan	Pakuncen, Patangpuluhan, dan Wirobrajan

Sumber : DPMPPA Kota Yogyakarta 2019

Salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan menginisiasi adanya program Kampung Ramah Anak (KRA) sebagai panjangan tangan dari program Kota Layak Anak itu sendiri. Upaya itu dilakukan untuk lebih menjangkau permasalahan yang ada di berbagai kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Banyaknya permasalahan yang menghambat perkembangan Kota Layak Anak ini terdiri dari banyak hal, mulai dari lingkungan sampai fasilitas yang disediakan pemerintah dan juga swasta. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan Kota Layak Anak melalui penyediaan fasilitas dan kelayakan lingkungan Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta sendiri memiliki banyak fasilitas penunjang yang disediakan oleh pemerintah di setiap kampungnya. Sehingga upaya untuk mengembangkan Kota Layak Anak sedikit demi sedikit bisa mencapai predikat utama. Untuk itu upaya dan fasilitas apa yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan predikat kota layak anak ini, sehingga penelitian ini dibuat.

Kota Yogyakarta dipilih dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi seperti faktor-faktor penghambat yang dari tahun ketahun tak kunjung berkembang. Banyak faktor penghambat seperti beberapa program yang belum terlaksana secara maksimal hingga penurunan peran masyarakat mengenai pengembangan KLA itu sendiri. Sedangkan tertulis pada perjanjian kinerja pemerintah pada tahun 2019 bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan perlindungan anak berkomitmen untuk mengembangkan dan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui Strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota untuk menanggulangi berbagai masalah dan penghambat dari pengembangan KLA di Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut

Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 ?

(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta (DPMPPA) )

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta tahun 2019 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Yogyakarta.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam proposal ini berfungsi untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan kota layak anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Selain itu penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian lain yang mempunyai tema sama dengan pembahasan di penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut :

- a) Secara teori, hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta itu sendiri.
- b) Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, kritik dan referensi tambahan pemerintah Kota Yogyakarta

dalam upaya peningkatan predikat Kota Layak Anak itu sendiri pada tahun berikutnya.

#### 1.4. Tinjauan Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Jurnal	Isi Temuan
1.	Ni Made Dwi Putri Kamayani. 2016	“Konsep-Konsep yang Terkait Dengan Kota Layak Anak di Kota Denpasar”	Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 5, No. 3. September 2016	Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep terkait Kota Layak Anak sebagaimana dipersepsikan orang tua di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Kota Layak Anak digali dan dikelompokkan melalui analisis dari faktornya. Terdapat empat pengukuran lingkungan perkotaan yang ideal terkait dengan Kota Layak Anak yang dapat diidentifikasi. Faktor itu adalah kebijakan, perlindungan, lingkungan dan perencanaan untuk anak-anak.
2.	Gerry Katon Mahendra (2017)	“Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan	Jurnal Kesehatan, Vol. 1, No. 2, September 2017	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KLA di Kota Yogyakarta tahun 2016. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menyebar angket. Hasil penelitian pelaksanaan kebijakan KLA bidang kesehatan ramah anak di puskesmas yang menerapkan pelayan kesehatan ramah anak tergolong BAIK (skor 2,77). Temuan dalam penelitian ini adalah dari 18 puskesmas baru empat yang melaksanakan pelayanan kesehatan ramah anak. Minimnya

		Ramah Anak”		kerjasama antar stakeholders pada implementasi kebijakan kesehatan ramah anak.
3.	Chatarina Rusmiyati dan Eny Hikmawati (2018)	“Implementasi Program Kampung Ramah Anak: dari Kampung Hitam Menuju Layak Anak”	Jurnal PKS. Vol 17, No. 2, Juni 2018	ke depan tidak menjadi beban. Pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dirangsang melalui kegiatan bermain. Untuk itu perlu diciptakan suatu kondisi yang memungkinkan anak dapat bermain dengan aman dan sehat yaitu lingkungan yang ramah anak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kampung ramah anak (KRA) di Badran Yogyakarta. Kampung Badran dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagai ujicoba pertama pembentukan kampung ramah anak di Yogyakarta dan dinilai berhasil. Subjek penelitian adalah orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan KRA, sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan KRA dilihat dari tujuh indikator, faktor pendukung dan penghambat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Analisis data secara deskriptif dengan memaknai data hasil observasi dan wawancara sehingga menggambarkan implementasi KRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KRA yang mengacu pada tujuh indikator menunjukkan hasil yang baik dalam arti ketujuh indikator terpenuhi sehingga dapat membangun kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

				Komitmen pemerintah, perubahan sikap masyarakat dan kepedulian dunia usaha menjadi faktor pendukung penyelenggaraan kampung ramah anak. Ada sebagian masyarakat yang masih kurang mendukung penyelenggaraan kampung ramah anak karena adanya kepentingan tertentu. Direkomendasikan perlunya peningkatan kerjasama dan perluasan jejaring dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak
4.	Romi Saputra (2018)	“Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Medan (Sumatera Utara) dan Pontianak (Kalimantan Barat)”	Jurnal Dukcapil Vol. 6, No. 2 Desember 2018	penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Medan, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskesmas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Sedangkan, Kota Pontianak belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Pontianak relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading

				sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.
5.	Darmini Roza dan Laurensius Asliman s. (2018)	“Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia”	Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 25 JANUARI 2018	Penelitian ini menjelaskan mengenai berbagai masalah dan kelebihan menjalankan program Kota Layak Anak di Indonesia itu sendiri. terdapat beberapa permasalahan 1. bagaimanakah partisipasi pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. 2.faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemerintahan daerah dalam mewujudkan KLA di daerah masing-masing. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif, bahan-bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: <i>pertama</i> , partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, dan layak ditetapkan menjadi KLA yaitu: 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan 5) Perlindungan Khusus.
6.	Hamid	“Kabupaten Kota	Jurnal	Dua puluh tujuh tahun yang lalu, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin

	Patilima. (2017)	Layak Anak”	Kriminologi Indonesia, Vol. 13 No. 1 Mei 2017	setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak. Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan KLA.  Banyak kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di berbagai tingkat dari Nasional sampai di tingkat pemerintahan Kabupaten ata Kota dengan melalui Kebijakan KLA..
7.	Sri Rahmayuni. (2017)	“Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota	Jurnal JOM FISIPOL Vol. 4 No. 2 Oktober 2017	Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru tahun 2014 adalah melalui 3 (tiga) strategi antara lain pertama strategi diverifikasi, yakni membuat kebijakan terkait pengembangan kota layak anak. Kedua strategi inovatif yakni membuat program/kegiatan yang mengacu pada 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak. Ketiga strategi preventif yakni melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan pengembangan KLA yang sudah dan belum

		Pekanbaru tahun 2014.”		<p>dilaksanakan, dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat program-program yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Dan menjadi bahan penilaian untuk mendapatkan peningkatan dalam Kategori Kota Layak Anak yang diberikan oleh Keentrian. Dai penjelasan beberapa strategi tersebut dapat disimpulkan bahwa program maupun kegiatan dalam upaya pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru sudah mulai terlaksana, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.</p> <p>Kendala yang dimaksud oleh penulis ada beberapa sebab yang sudah di jelaskan seperti. Sosialisasi untuk masyarakat mengenai program KLA yang kurang dan belum maksimal dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.</p>
8.	Boby Novika.  (2018)	Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak	Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 24, No.2, Agustus 2018.	<p>Menurut penulis penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dan berbagai dampak dari pelaksanaan programnya Kota Layak Anak. Di kecamatan gedongtengen kota Yogyakarta yang ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan program Kota Layak Anak ini. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif deskriptif.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlaksananya program KLA belum optimal</p>

		<p>Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta).”</p> <p>Vol. 24, No.2, Agustus 2018</p>		<p>dilaksanakan di kecamatan tersebut. Terdapat beberapa aspek yang menghambat program tersebut. Mulai dari persiapan dan pengembangan program turunan dari KLA. Namun kecamatan ini memiliki potensi untuk ikut meningkatkan program tersebut.</p>
9.	Jazariyah. (2016)	<p>“Kampung Ramah Anak Gendeng Sebagai</p>	<p>Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol.</p>	<p>Artikel ini dimaksudkan untuk mengungkap pentingnya eksplorasi lingkungan bagi anak. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan lingkungan ramah anak yang juga merupakan upaya khusus dari pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang</p>

		Alternatif Pemenuhan Hak Berkembang Pada Anak Usia Dini.”	1 No. 1, Maret 2016	Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampung ramah anak di Gendeng merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam pemenuhan hak tumbuh dan berkembang pada anak usia dini. Pelaksanaan Kampung Ramah Anak Gendeng tertuang dalam berbagai program diantaranya desain lingkungan ramah anak, forum anak, bimbingan belajar anak serta Taman Pendidikan Al Qur’an. Beberapa pendukung pelaksanaan kampung ramah anak adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya tumbuh kembang anak, sosialisasi yang berkelanjutan serta kerjasama yang baik antar masyarakat. Adapun factor penghambat dalam pelaksanaan kampung ramah anak diantaranya ketersediaan dana yang minim untuk pelaksanaan program yang telah dirancang serta kurangnya monitoring dan evaluasi dari tingkatan yang lebih tinggi sehingga menimbulkan kurangnya motivasi.
10.	Karya Widyawati dan Rita Laksmitasari.	“Penilaian Ruang Bermain Anak Di Kota Depok sebagai Salah	Jurnal penilaian Ruang Bermain Anak, Vol. 8 No. 3, 2015	Berdasarkan PP No.38 dan 41 tahun 2007, menyebutkan bahwa masalah anak menjadi urusan wajib pemprov dan pemkab/kota. Keberadaan tempat bermain anak sebagai salah satu indikator kota layak anak perlu diteliti keberadaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penilaian kelayakan tempat bermain anak

	( 2015)	Satu Indikator Tercapainya Kota Layak Anak.”		baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun kualitas sehingga akan tercapai pembangunan kota berdasarkan perspektif kota layak anak. Targetnya adalah memberikan usulan kepada pemerintah terhadap kebutuhan taman bermain anak di Wilayah Depok baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga tercapai Depok Kota Layak Anak. Metode yang digunakan adalah survey lapangan dengan melakukan pengamatan dan pendokumentasian serta wawancara untuk melihat kondisi yang lebih terperinci.. Kesimpulannya Keberadaan taman bermain di Kecamatan.
--	---------	--	--	--

Maka dari beberapa jurnal terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan Lingkungan layak Anak bukan hanya mengenai fasilitas saja namun mengenai kehidupan sosial, kelayakan tempat bermain, dan tingkat pelayanan hak-hak dari anak-anak itu sendiri. Sehingga dari beberapa studi terdahulu diatas bisa menjadi acuan untuk kepenulisan proposal ini selanjutnya.

## **1.5. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Teori Strategi**

#### **a. Definisi Strategi**

Pengertian strategi itu sendiridi berbagaimacam pengertiannya, banyak para ahli yang mengemukakan pengertian dan maksud dari strategi melalui teori dan bukunya masing-masing. Dalam bahasa Yunani strategi adalah gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Menurut salah satu ahli strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian,2004).Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture (David, 2009, h.15). pendapat Marrus berdampingan dengan beberapa contoh definisi strategi diatas yang menjelaskan bahwa “strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai” (marrus, 2002).

Selain itu pengertian strategi, menurut para ahli seperti Freddy Rangkuti mengatakan bahwa strategi merupakan usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan Hamel dan Prahalad mengemukakan bahwa strategi merupakan sebuah tindakan yang bersifat terus meningkat secara terus menerus atau incremental dan dilakukan dengan sudut pandang yang diinginkan oleh pelanggan untuk masa depan. Sedangkan Richard L. Daft mendefinisikan strategi secara eksplisit, berupa sebuah rencana atau tindakan yang menerangkan alokasi sumber daya dan berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapai tujuan perusahaan. Keunggulan bersaing (competitive) adalah hal yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain dan memberi ciri khas bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Sedangkan inti dari strategi adalah untuk menentukan bagaimana sebuah perusahaan dapat memiliki keunikan lain yang berbeda dengan satu perusahaan lainnya.

Mintzberg-sebagaimana dikutip oleh Ismail Sholihin juga memperluas konsep strategi dan mendefinisikan strategi dengan memperhatikan berbagai dimensi dari konsep strategi. Mintzberg menamakannya “Strategi 5 P”, yaitu:

- a) Strategi sebagai rencana (Plan). Tahapan strategi ini adalah yang paling penting yaitu perencanaan awal dari strategi. Untuk mendahului dan merancang tindakan apa yang selanjutnya akan dilaksanakan dalam pembuatan strategi. Selain itu dijadikan sebagai rencana agar mengetahui tercapainya tujuan dari strategi rencana ini.

- b) Strategi sebagai sebuah manuver (Play). Dalam hal ini strategi merupakan suatu manuver yang spesifik untuk memberi isyarat mengancam kepada pesaing perusahaan. Misalnya keputusan yang dibuat oleh pemimpin pasar untuk memperbesar kapasitas pabrik tidak hanya merupakan strategi dalam arti sebuah “plan”, melainkan strategi ini juga akan menjadi “play” sehingga dapat menyurutkan minat pendatang baru potensial untuk memasuki industri bersangkutan karena pendatang baru tersebut misalnya tidak memiliki skala ekonomi yang sebanding dengan pemimpin pasar.
- c) Strategi sebagai sebuah pola (Pattern) Strategi sebagai sebuah pola menunjukkan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengejar sebuah tujuan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, Mintzberg menemukan fenomena bahwa strategi yang direncanakan perusahaan melalui proses perencanaan yang diterjemahkan ke dalam suatu tindakan strategi yang disengaja seringkali berubah menjadi strategi yang tidak dapat direalisasikan akibat terjadinya perubahan lingkungan perusahaan. Sebaliknya strategi yang tidak dimaksudkan sebelumnya dapat muncul menjadi alternatif strategi yang apabila diimplementasikan perusahaan dapat menjadi strategi yang dapat direalisasikan.
- d) Strategi sebagai sebuah posisi (Position) Dalam hal ini strategi menunjukkan berbagai keputusan yang dipilih perusahaan untuk memposisikan organisasi perusahaan didalam lingkungan perusahaan.

e) Strategi sebagai sebuah sudut pandang (Perspective) . strategi yang dimaksud adalah sebagai pandangan untuk menunjukkan prespektif dar pembuat strategi itu sendiri. strategi juga merupakan sebuah pemikiran ada di pembuat strategi itu sendiri.

McNichols dalam J.Salusu (2006:101) “strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”. Pearce II dan Robinson (2008:2), “strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan Perusahaan dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan”.

#### b. Perumusan Strategi

Padadasarnya strategi merupakan garis besar terhadap tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu strategi harus dirumuskan selaras dengan isu strategi yang telah diidentifikasi. Dalam perumusan strategi mewujudkan kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak menggunakan metode :

- 1) Mengidentifikasi alternative umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu isu strategis.
- 2) Mempelajari kendala yang muncul dalam pelaksanaan strategi tersebut.

- 3) Merumuskan usulan usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan strategi tersebut, sekaligus mengantisipasi munculnya kendala.

Jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud strategi adalah suatu rencana yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan perlindungan anak kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan menjadi Kota Layak Anak. Untuk itu strategi merupakan cara dari kegiatan pengambilan keputusan dari DPMPPA kota Yogyakarta, dengan demikian perumusan strategi merupakan bagian dari manajemen strategis.

Perumusan langkah strategi penelitian ini menggunakan manajemen strategis, maka dalam menganalisa data digunakan urutan proses analisis yang mengacu pada model tersebut dan terbagi dalam beberapa tahapan proses :

1. Analisis lingkungan strategi

- a. Lingkungan internal

Merupakan salah satu dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategis, dimensi ini meangkut kekuatan (strength) dan kelemahan(weakness) yang pada umumnya dimiliki dalam pengembangan wilayah, bagin dari suatu analisis yang telah dikenal secara dunia akademik engan istilah SWOT (strength, weaknes, opportunities, threats)

Faktor kekuatan (strength) dalam hal kelemahan (Weakness) terdapat dalam suatu kegiata lembaga. Hal ini merupakan sebuah instrumen dalam melakukan analisis perencanaan strategis, untuk memaksimalkan peranan faktor-faktor tersebut sekaligus berperan sebagai alat untuk memanipulasi kelemahan dan menekan dampak ancaman

yang timbul, jika para penentu strategi kebijakan mampu menghadapi dua faktor tersebut dengan tepat, maka upaya memilih dan menentukan strategi yang efektif membuahkan hasil yang diinginkan.

b. Lingkungan eksternal

Dalam lingkungan eksternal dikenal adanya faktor peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats), yakni faktor yang berasal dari luar, yang bisa menguntungkan dan mengancam serta dapat mempengaruhi dinamika pembangunan, berupa lingkungan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar.

Suatu lingkungan eksternal diperlukan untuk menekan agar berhasil meraih keberhasilan yang diharapkan di masa depan, sehingga dapat diperhatikan dengan matang tujuan utama lingkungan eksternal adalah untuk mengetahui lingkungan dari luar agar dapat secara jelas mengetahui peluang dan ancaman.

2. Analisis strategis

Pengidentifikasi isu strategis adalah inti dari proses perencanaan strategis. Isu-isu strategis didefinisikan sebagai persoalan atau tantangan kebijakan mendasar yang menentukan mandate, misi dan tinjauan. Oleh karena itu, upaya organisasi mempengaruhi isu-isu itu dibingkai dan juga menentukan pilihan-pilihan strategis yang akan ditangani pada langkah selanjutnya.

3. Perumusan Strategi

Pada dasarnya strategi merupakan garis besar terhadap tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu strategis harus dirumuskan selaras dengan isu strategis yang telah diidentifikasi. Dalam perumusan strategi mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak menggunakan metode :

- a. Mengidentifikasi alternative umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu strategi
- b. Mempelajari kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternative umum tersebut.
- c. Merumuskan usulan utama yang dapat digunakan untuk menjawab alternative tersebut, sekaligus mengantisipasi munculnya kendala.
- d. Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam satu dua tahun kedepan.

Berikut ini merupakan Matrik SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Penentuan faktor-faktor SWOT diperoleh berdasarkan tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary). Alternatif strategi dapat diketahui dari identifikasi faktor kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T). Matrik SWOT sebagai alat pencocokan yang mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO, WO, ST dan WT.

#### 1) Matrik SWOT

Kemudian analisis SWOT diklarifikasikan kedalam kelompok yang dapat menghasilkan empat kemungkinan strategi alternatif yang dapat dilakukan (Rangkuti 2006: 18-21), yaitu :

##### a) Strategi Strengths-Opportunities (SO)

Strategi SO berupaya untuk menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.

b) Strategi Strengths-Threats (ST)

Merupakan kombinasi antara strengths (kekuatan) dan threats (tantangan), yang berupaya menggunakan seoptimal mungkin kekuatan internal untuk menghadapi tantangan atau hambatan dari luar.

c) Strategi Weakness-Opportunities (WO)

Merupakan gabungan antara weaknesses (kelemahan) dan opportunities (peluang), yang berupaya untuk meminimalkan kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada.

d) Strategi Weakness-Threats (WT)

Merupakan gabungan antara weaknesses (kelemahan) dan threats (tantangan), yang berupa meminimalkan kelemahan internal dan menghindari tantangan atau ancaman.

Sedangkan Definisi analisis SWOT menurut Tunggal (1994:74-75) adalah sebagai berikut:

a) Peluang (Opportunities)

Suatu peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan pemerintahan. Kecenderungankecenderungan utama ini adalah salah satu peluang Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Fasilitas yng menunjang, agar Kabupaten tersebut mendapat predkat Kabupaten Layak Anak.

b) Ancaman (Threats) Ancaman adalah rintangan-rintangan utama bagi posisi

sekarang atau yang sedang dialami oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan antar setiap Kabupaten,keadaan masyarakat di masing-masing abupaten, dan

bagaimana Pemerintah Daerah meningkatkan usaha untuk mencapai predikat sebagai Kabupaten Layak Anak

c) Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan dari setiap Kabupaten yang ingin mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak. Kekuatan berkaitan dengan sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan Pemerintah Daerah ke masyarakat, dan faktor-faktor lain.

d) Kelemahan (weaknesses)

Kelemahan merupakan keterbatasan/ kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan, dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif Pemerintah Daerah.

Dari pembahasan diatas analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi. Kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

2) Langkah Analisis SWOT

Ada dua langkah utama untuk membuat analisis SWOT:

- a) SWOT merupakan gabungan dari beberapa komponen untuk menganalisis seperti, strength, weakness, opportunities, dan threats yang dapat digunakan untuk menganalisis sesuatu.

b) Setelah menguraikan dan mengetahui berbagai komponen dari SWOT ini maka selanjutnya menguraikan dan membuat strategi berdasarkan matrik tersebut.

Sebuah strategi dapat diterapkan dengan berbagai cara yang masih signifikan dengan komponen-komponen yang membentuk swot itu sendiri dengan menerapkan matriks. Sehingga dapat digunakan sebagai berikut:

- a) Bagaimana cara kekuatan (*strengths*) kita bisa mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada saat ini.
- b) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang menghambat kita dalam mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada.
- c) Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi berbagai hambatan atau ancaman (*threats*) yang ada.
- d) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) baru.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal dalam suatu perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

## 2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah merupakan lembaga perpanjangan tangan. Pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan

dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. (Taliziduhu: 1991).

Berdasarkan Undang-Undnag No.32 tahun 2004 pasal 2 ayat 2 dan 3 pemerintahan Daerah mempunyai fungsi dan tugas mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan maksud menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya sing daerah.

Prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah, adalah :

- 1) Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pebantuan
- 2) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- 3) Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

Pemerintahan itu sendiri menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dibekali dengan hak dan kewajiban, seperti berikut:

- 1) Hak-hak pemerintah daerah, seperti
  - a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
  - b. Memilih pemimpin daerah
  - c. Mengelola aparatur daerah
  - d. Mengelola kekayaan daerah

- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban pemerintah daerah, seperti:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan sosial, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya

- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini Pemerintah Daerah yang dipilih menjadi sasaran penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

### 3. Kota Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak merupakan Kabupaten ataupun Kota yang memiliki struktur pembangunan daerah yang berlandaskan hak - hak anak dengan pengintegrasian dari komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga swasta seperti dunia usaha, yang sudah terstruktur dengan menyeluruh dan juga berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan agar dapat menjamin hak-hak anak yang harus terpenuhinya.

Sedangkan untuk membangun KLA secara inisiatif pihak pemerintahan kabupaten ataupun kota yang memiliki upaya untuk mentransformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum menuju ke definisi, strategi dan intervensi pembangunan, yang merupakan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

KLA adalah suatu strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pencapaian hak anak yang sesuai kewajiban. Kota Layak Anak diperkenalkan secara nasional oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dengan maksud sebagai akomodasi untuk pemerintahan daerah maupun kabupaten, akhir-akhir ini Kota Layak Anak berubah sedikit menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan dapat disingkat dengan sebutan KLA. Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan strategi dari pemerintahan kabupaten/kota untuk mendapatkan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak (Hasni, 2008).

a. Tujuan Umum KLA

Kota Layak Anak merupakan strategi pemerintah untuk berkomitmen menjaga hak-hak anak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak ( Convention on the rights of Child ) yang memiliki bentuk Kebijakan, Kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang terfokus pada pemenuhan hak-hak anak.

b. Tujuan Khusus KLA

Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan pembangunan yang ramah terhadap hak-hak anak yang sangat di butuhkan dalam beberapa aspek, dan juga upaya untuk meningkatkan potensi sumberdaya manusia dalam hal keuangan, sarana prasarana, dan teknologi. KLA sendiri bertujuan khusus untuk memenuhi hak anak dalam berbagai aspek. Hak-hak anak yang di maksud adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapat pelayanan kesehatan dan sekolah yang baik.

c. Strategi Pengembangan KLA

KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a) Proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.
- b) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA).

Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hakdasar anak dalam penyusunan perundangan-undangan,kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

- 2) Penguatan kelembagaan.

Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

3) Perluasan jangkauan.

Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

4) Membangun jaringan.

Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

5) Pelembagaan dan pembudayaan KLA.

Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (*nucleous dan etened families*) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

6) Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

7) Sertifikasi dan apresiasi

Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

### **1.6. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

a) Strategi

Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan Perusahaan dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah

di tetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

b) Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah merupakan lembaga perpanjangan tangan. Pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. (Taliziduhu: 1991).

c) Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.(Hasni, 2008)

## **1.7. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan indikator-indikator untuk mengatur variable penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Dengan kata lain definisi operaioanl merupakan operasionalisasi dri tatanan teoritik ke empiric. Beberapa indikator tersebu adalah :

1. Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2019.
2. Analisis lingkungan strategi dengan analisis SWOT  
Merupakan kemampuan lembaga untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal
  - a. Melalui lingkungan internal
    1. Strength ( Kekuatan)
      - Kemampuan organisasi dapat berkembang lebih cepat
      - Kemampuan mewaspadai perubahan lingkungan yang tidak menentu
    2. Weakness (Kelemahan)
      - Dapat meminimalka kelemahan yang ada dengan menghindari ancaman
      - Kemampuan untuk mengatasi kerugian dari strategi yang dilaksanakan
  - b. Lingkungan eksternal
    1. Oportunities (Peluang)
      - Kemampuan memanfaatkan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada
      - Kemampuan merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang sedang dibutuhkan
    2. Threats (Ancaman)
      - Kemampuan mengidentifikasi kendala

- Kemampuan organisasi untuk mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat.

## **1.8. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian Kualitatif ini digunakan untuk melakukan penelitian secara mendalam bukan dengan hasil angka, melainkan dengan hasil dari wawancara dengan narasumber, dokumen-dokumen, catatan dan obeservasi lapangan. Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai strategi Pemerintahan Daerah dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 . (Emzir, 2012)

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan atau informan. Penentuan sumber informan ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kapabelitas yang berkompeten di bidangnya.

#### b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang diteliti. Objek penelitian ini adalah Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Yogyakarta.

c. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah :

c) Data primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang didapatkan secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data primer yang akan digunakan berupa wawancara dengan narasumber secara informan di lingkungan kerja Pemerintah Kota Yogyakarta

Dalam Proses Observasi lapangan, data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti berhasil melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dalam hal perencanaan maupun teknis terhadap strategi Pemerintahan Daerah dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. (Suparlan, 1996:3-44).

d) Data sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang didapatkan tidak secara langsung, melalui dokumen – dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (yang berkaitan) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data sekunder yang akan digunakan adalah dokumen. Pada umumnya data sekunder merupakan beberapa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. (Suparlan, 1996:3-44).

d. Teknik pengumpulan data

Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting untuk menjawab permasalahan penelitian. Data tersebut didapatkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Observasi

Observasi dilaksanakan di kantor Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tepatnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara langsung kepada peneliti tentang apa yang akan diteliti sehingga peneliti mengetahui secara mendalam tentang bentuk strategi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan sebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dikembangkan pemerintah daerah setempat untuk mencapai tujuan dari program Kota Layak Anak (KLA) dan perkembangan atau perubahan apa yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. (Basrowi, 2008)

b) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan mengenai konsep

penelitian terhadap individu menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian.

(Basrowi,2008)

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa. Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan dapat berupa deskripsi kerja, laporan tahunan, buku, website, surat kabar, gambar dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. (basrowi,2008)

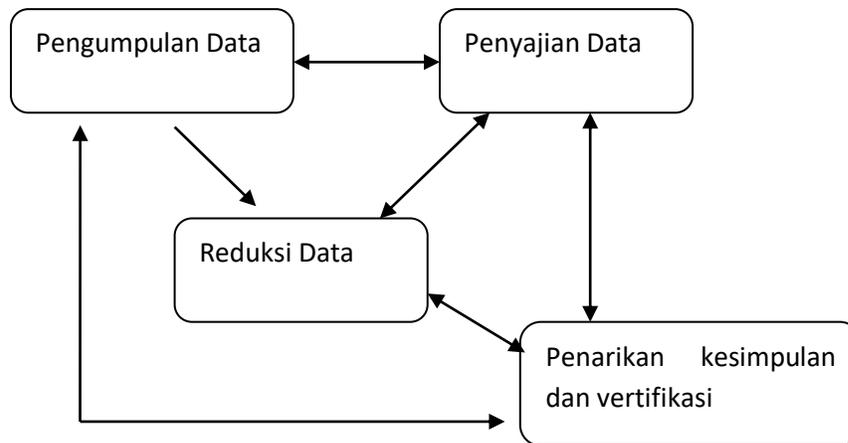
e. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam kategori dan uraian dasar. Data-data yang telah terkumpul dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. Data yang telah terkumpul akan diseleksi dan disajikan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil . miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Verifikasi penarikan kesimpulan.

Adapun tahapannya meliputi :

Gambar Bagan 2

Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam proses analisis data yaitu :

a. Reduksi data

merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan catatan lapang peneliti yang dilakukan di unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta akan dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan memberikan gambaran lebih jelas dalam memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan, sehingga akan mempermudah penyajian data.

Proses reduksi data yang dilakukan meliputi rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari bahasan dari data yang diperoleh sesuai tema. Reduksi data dilakukan oleh peneliti dan dapat dibantu dengan alat elektronik seperti komputer. (Mamang, Etta. 2010)

b. Penyajian data

menyajikan sekelompok informasi yang tersusun dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Setelah data-data tentang strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Kota Layak Anak di Pemerintah Kota Yogyakarta selanjutnya akan di sajikan data dalam bentuk uraian yang di dukung dengan data dan dokumentasi yang diperoleh peneliti . penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab mengenai bagaimana tentang strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kota Yogyakarta.

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Proses penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis yang valid dan handal. (Mamang, Etta. 2010)

c. Vertifikasi atau pengambilan keputusan

merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang diperoleh tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kota Yogyakarta. dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan, temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti.

kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Dengan demikian reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. (Mamang, Etta. 2010)

Keempat tahap ini saling mempengaruhi. Sehingga setiap tahapnyaharus di laksanakan dengan benar dan terstruktur secara rapi.